

Revitalisasi Peran Komite Sekolah dalam Perumusan Kebijakan Pendidikan di SMP PGRI Kambu Nusa Tenggara Barat

Muhammad Zulfahmi Akbar

Institut Agama Islam Nurul Hakim Lombok

email: akbarfahmi636@gmail.com

ABSTRACT

The role of school committees in formulating participatory and adaptive education policies remains marginal and is often limited to administrative functions. This study aims to explore and revitalize the strategic role of school committees in decision-making processes, particularly at the secondary school level. Using a qualitative case study approach, data were collected through participant observation and semi-structured interviews involving principals, senior teachers, and school committee members. Data analysis was conducted using the Miles and Huberman interactive model, which includes data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The study findings indicate that although school committees are partially involved in planning activities such as budgeting, extracurricular programs, and student admission policies, their involvement in strategic aspects such as curriculum reform and long-term policies remains very limited. This study recommends the need for systematic training on education policy and school governance, the development of practical standard operating procedures (SOPs), and democratic restructuring of committees to ensure institutional independence. Strengthening in these areas will enable school committees to act as effective partners in realizing transparent, accountable, and high-quality education governance.

Key Words: School Committee, Policy, Governance

ABSTRAK

Peran komite sekolah dalam merumuskan kebijakan pendidikan yang partisipatif dan adaptif masih bersifat marginal dan sering kali terbatas pada fungsi administratif. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi dan merevitalisasi peran strategis komite sekolah dalam proses pengambilan keputusan, khususnya di tingkat sekolah menengah. Dengan menggunakan pendekatan studi kasus kualitatif, data dikumpulkan melalui observasi partisipatif dan wawancara semi-terstruktur yang melibatkan kepala sekolah, guru senior, dan anggota komite sekolah. Analisis data dilakukan dengan menggunakan model interaktif Miles dan Huberman, yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa meskipun komite sekolah terlibat sebagian dalam kegiatan perencanaan seperti penganggaran, program

ekstrakurikuler, dan kebijakan penerimaan siswa, keterlibatan mereka dalam aspek strategis seperti reformasi kurikulum dan kebijakan jangka panjang masih sangat terbatas. Penelitian ini merekomendasikan perlunya pelatihan sistematis terkait kebijakan pendidikan dan tata kelola sekolah, penyusunan SOP praktis, serta restrukturisasi komite secara demokratis untuk menjamin independensi kelembagaan. Penguatan di bidang-bidang ini akan memungkinkan komite sekolah berperan sebagai mitra yang efektif dalam mewujudkan tata kelola pendidikan yang transparan, akuntabel, dan berkualitas tinggi.

Kata Kunci: Komite Sekolah, Kebijakan, Tata Kelola

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan salah satu pilar utama dalam pembangunan suatu negara. Melalui pendidikan yang berkualitas, suatu negara dapat melahirkan generasi yang berkompeten, berdaya saing tinggi, dan siap menghadapi tantangan dalam pengelolaannya (Sukinawan et al., 2025). Dalam upaya menciptakan kualitas pendidikan yang optimal, diperlukan kolaborasi antara berbagai pihak yang terlibat, termasuk pemerintah, pihak sekolah, orang tua, dan masyarakat. Salah satu bentuk keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan sekolah adalah melalui keberadaan komite sekolah, yang berfungsi sebagai wadah untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan terkait kebijakan sekolah. Kedudukan komite sekolah sebagai lembaga mandiri yang dibentuk guna memberikan pertimbangan, arahan, dukungan kerja, sarana prasarana dan penguasaan tingkat satuan pendidikan menunjukkan sebuah komitmen yang cukup jelas dalam penyelenggaraan pendidikan nasional (Ghozali & Ariskawanti, 1913).

Pembentukan komite sekolah/madrasah merupakan upaya adanya suatu organisasi masyarakat yang memiliki kepedulian terhadap peningkatan kualitas pendidikan. Badan komite sekolah/madrasah ini dapat dikembangkan oleh semua pihak baik lembaga pendidikan maupun dari pihak komite sendiri. Hal ini dapat dilakukan dengan cara merujuk dari kesepakatan dan kepercayaan yang telah dibangun sesuai dengan potensi yang dimiliki masyarakat sekitar (Bisri, 2020).

Untuk melaksanakan program-programnya, sekolah perlu mengundang beberapa pihak seperti keluarga, masyarakat, dan dunia usaha/industri untuk berpartisipasi secara aktif dalam berbagai program pendidikan. Agar partisipasi tersebut dapat lebih bermakna bagi sekolah, terutama dalam peningkatan mutu dan efektivitas pendidikan, maka perlu dikelola dan dikoordinasikan dalam suatu wadah yang kemudian disebut dengan Dewan Pendidikan di tingkat Kabupaten/Kota, dan Komite Sekolah disetiap satuan Pendidikan. Hal ini dimaksudkan agar pelaksanaan program kerja di satuan pendidikan dapat dilaksanakan sesuai yang diharapkan (Purnawati & Setyaningsih, 2024). Untuk mewujudkan program komite sekolah yang efektif maka komite sekolah harus mensosialisasikan kebijakan program pendidikan kepada masyarakat, memfasilitasi berbagai masukan kebijakan program terhadap sekolah, menampung pengaduan dan keluhan terhadap kebijakan dan program sekolah, mengkomunikasikan pengaduan dan keluhan masyarakat terhadap sekolah (Sandra et al., 2023).

Komite sekolah adalah lembaga yang dibentuk untuk melibatkan orang tua siswa, guru, dan anggota masyarakat, dengan harapan dapat memberikan kontribusi dalam pengambilan keputusan yang berorientasi pada perbaikan kualitas pendidikan. Di tingkat sekolah menengah, keputusan yang melibatkan berbagai aspek, seperti kebijakan kurikulum, anggaran, kegiatan ekstrakurikuler, serta kebijakan disiplin, sering kali membutuhkan perspektif yang lebih luas, yang dapat diperoleh melalui keterlibatan komite sekolah. Keterbatasan peran komite sekolah juga terlihat pada pengelolaan program-program strategis sekolah. Misalnya, dalam penyediaan fasilitas belajar, masih terdapat ruang kelas yang kurang layak digunakan. Hal ini berdampak pada kenyamanan siswa dalam belajar. Selain itu, minimnya dukungan untuk pengembangan kegiatan ekstrakurikuler menunjukkan belum optimalnya kolaborasi antara sekolah dan komite dalam meningkatkan mutu pendidikan (Kasroni et al., 2025).

Menurut (Permendikbud RI, 2016) komite sekolah memiliki fungsi strategis dalam memberikan pertimbangan, dukungan, dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan. Namun, implementasi peran ini sering kali terbatas pada aspek administratif, dengan keterlibatan yang minim dalam perencanaan, pengawasan, dan evaluasi kebijakan. Banyak keputusan penting masih didominasi oleh kepala sekolah dan manajemen internal sekolah tanpa keterlibatan yang memadai dari komite sekolah. Pengelolaan pendidikan yang bersifat terpusat sering kali membuat kebijakan tidak efektif di tingkat sekolah. Dengan pelimpahan otoritas ke sekolah, peran kepala sekolah menjadi semakin penting. Kepala sekolah dituntut untuk memajukan pendidikan melalui kepemimpinan yang efektif dan akuntabilitas yang tinggi (Reski & Palittin, 2021).

Beberapa penelitian sebelumnya telah mengkaji peran komite sekolah dalam pengambilan keputusan, namun sebagian besar berfokus pada implementasi kebijakan dan peran pengawasan, tanpa memperhatikan secara mendalam faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat keterlibatan mereka. Penelitian oleh (Sari et al., 2023) menunjukkan bahwa meskipun komite sekolah memiliki peran penting dalam pengawasan kebijakan sekolah, mereka cenderung terbatas. Ini terlihat dari adanya faktor yang membuat komite sekolah menjadi terhambat dalam pengembangan pendidikan adalah ketidakaktifan anggota-anggota komite sekolah karena kesibukan anggota komite sekolah dalam aktivitasnya masing-masing dan tidak adanya dana komite sekolah sehingga membuat anggota komite sekolah jarang melakukan pertemuan dengan orang tua siswa dengan pihak sekolah.

Peran komite sekolah dalam menjaga transparansi anggaran dan kebijakan. Dalam usaha mengumpulkan dana untuk keperluan sekolah, komite sekolah memegang peran serta tanggung jawab yang vital. Komite sekolah memiliki kemampuan untuk mendukung beragam jenis inisiatif finansial seperti aktivitas ekstrakurikuler, peningkatan fasilitas, dan pembiayaan program-program yang terkait dengan peningkatan kualitas pendidikan di sekolah, yang tidak dianggarkan dalam anggaran rutin (Nisa & Abidin, 2024).

Dalam penelitian lainnya juga menambahkan bahwa keberhasilan komite sekolah dalam pengambilan keputusan sangat bergantung pada pelatihan dan pemahaman yang dimiliki oleh anggota komite mengenai sistem pendidikan dan kebijakan yang ada (Sari et al., 2023).

Dengan mengacu pada penelitian-penelitian terdahulu, penelitian ini berfokus pada pendekatannya yang lebih komprehensif dalam menggali berbagai faktor yang mempengaruhi redupnya fungsi komite sekolah, serta dampaknya terhadap kualitas keputusan yang diambil. Penelitian ini juga mengusulkan pemahaman yang lebih dalam mengenai cara yang bisa ditempuh untuk merevitalisasi peran antara komite sekolah dalam pengambilan keputusan yang lebih strategis. Penelitian ini berangkat dari kebutuhan untuk mengevaluasi dan memperkuat fungsi komite sekolah agar benar-benar mampu menjadi mitra strategis sekolah dalam membangun kebijakan yang partisipatif, transparan, dan berkualitas.

METODE

Dalam penelitian data dikumpulkan melalui teknik observasi partisipan dan wawancara semiterstruktur. Observasi ini dilakukan dengan cara melibatkan diri dalam kegiatan strategi peningkatan mutu pendidikan melalui partisipasi komite sekolah di SMP PGRI Kambu, sehingga dapat menangkap dan merasakan eksistensi komite sekolah. Wawancara semiterstruktur digunakan untuk memastikan bahwa peneliti mampu menggali data sesuai fokus penelitian yang disusun dalam sebuah instrumen wawancara. Instrumen tersebut dijadikan panduan untuk mewawancarai subjek penelitian yang dipilih secara purposif agar hasil yang diperoleh terdata dengan baik (Moleong, 2018; Sugiyono, 2017)

Data penelitian ini diperoleh di SMP PGRI Kambu, Kecamatan Kilo, Kabupaten Dompu, NTB. Waktu Pengambilan data pada bulan Februari 2025. Penentuan subyek dalam penelitian menggunakan metode purposif dengan pertimbangan bahwa semua narasumber merupakan narasumber yang dapat memberikan informasi sesuai fokus penelitian, yang terdiri atas kepala sekolah, beberapa guru senior, ketua komite sekolah, dan anggota komite sekolah.

Penggunaan observasi partisipan dan wawancara itu sengaja dilakukan dalam rangka triangulasi teknik, sehingga data yang diperoleh melalui observasi dapat dicek silang dengan data yang diperoleh melalui wawancara. Demikian juga sebaliknya. Selain triangulasi teknik, kredibilitas data juga dicek dengan triangulasi sumber. Artinya, peneliti mengajukan pertanyaan yang sama kepada beberapa narasumber yang berbeda. Data-data yang dipandang kredibel itu kemudian dianalisis menggunakan model interaktif Miles dan Huberman yang meliputi: reduksi data, penyajian data, dan verifikasi/simpulan (Nisa & Abidin, 2024).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Menurut Fadila (2026) yang menjadi Kepala Sekolah, peran komite di SMP PGRI Kambu dalam proses perencanaan kegiatan sekolah seperti rencana kerja sekolah dipandang sebagai salah satu komponen penting dalam pengambilan keputusan utama di lingkungan sekolah. Selanjutnya, kapasitas komite SMP PGRI Kambu untuk mengembangkan rencana kerja dapat ditingkatkan dengan melibatkannya dalam pengembangan rencana dan program sekolah serta tahap persiapan dan persetujuan RAPBS. Komite Sekolah juga bertanggung jawab untuk melaksanakan rencana pendidikan dan menetapkan standar untuk layanan sekolah berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan demokrasi.

Berdasarkan hasil analisis data, ditemukan bahwa komite sekolah terlibat dalam beberapa aspek pengambilan keputusan, seperti alokasi anggaran, kegiatan ekstrakurikuler, dan kebijakan penerimaan siswa baru. Namun, mereka kurang terlibat dalam keputusan-keputusan strategis seperti perubahan kurikulum atau kebijakan jangka panjang. Faktor-faktor yang mempengaruhi peran komite sekolah antara lain, keterbatasan pemahaman anggota komite, kurangnya pelatihan dan komunikasi yang kurang efektif.

Ketua Komite Sekolah (2026) menyampaikan bahwa keterlibatan komite sekolah dalam proses perencanaan kegiatan merupakan hal yang krusial untuk memastikan keberhasilan dan kesinambungan program serta kebijakan yang dijalankan oleh sekolah. Bentuk partisipasi tersebut dapat berupa kontribusi pemikiran, perasaan, maupun tindakan nyata, dengan memanfaatkan seluruh potensi yang dimiliki, termasuk inisiatif dalam berbagai aktivitas, guna mendukung tercapainya tujuan dan pelaksanaan tanggung jawab masing-masing pihak yang terlibat.

Velly Maryaning (2026), seorang guru pendidikan agama Islam, menyatakan bahwa komite sekolah memiliki peran strategis dalam menjalankan fungsinya, khususnya dalam membantu merumuskan dan merancang kebijakan yang berpengaruh terhadap aktivitas sekolah. Dalam pengembangan kebijakan, komite berfungsi sebagai jembatan antara kepentingan masyarakat dan pihak sekolah, sekaligus menjadi wadah untuk menyampaikan aspirasi serta memberikan masukan terhadap kebijakan yang direncanakan.

Sementara itu, Eva (2026) selaku wali murid menambahkan bahwa komite sekolah juga memiliki peran penting dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap sekolah. Komite turut bertanggung jawab memastikan kebijakan sekolah terlaksana secara berkelanjutan. Bentuk pengawasan tersebut mencakup pemantauan terhadap pelaksanaan program sekolah dan pengelolaan dana, menindaklanjuti berbagai aduan, saran, serta kritik dari siswa, orang tua, maupun masyarakat, dan menilai kinerja sekolah berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan oleh komite.

Faktor keterbatasan pemahaman peran anggota komite diketahui dari banyaknya anggota komite sekolah yang merasa kurang memiliki pemahaman yang memadai mengenai kebijakan pendidikan dan peraturan yang berlaku di sekolah. Hal ini menghambat mereka untuk terlibat secara maksimal dalam pengambilan keputusan. Salah satu wali murid mengatakan bahwa walaupun ada sisi kelebihan komite memiliki sisi ketimpangan relasi kekuasaan antara komite dan sekolah sering kali mengakibatkan posisi tawar yang kuat terhadap kepala sekolah ini dikarenakan komite dipilih secara formalitas dan tidak adanya mekanisme demokratis dalam pembentukan struktur intern komite tersebut.

Narasumber lainnya di SMP ini juga mengatakan faktor kurangnya pelatihan diketahui dari sedikitnya anggota komite sekolah yang mendapatkan pelatihan tentang pengelolaan pendidikan dan sistem administrasi sekolah, yang mengurangi kemampuan mereka untuk memberikan masukan yang substantif dalam pengambilan keputusan. Belum ada sistem evaluasi dan monitoring peran komite dan juga tidak ada mekanisme standar untuk menilai aspek yang harus

dimiliki oleh tim komite diantaranya adalah evaluasi kinerja komite secara berkala ataupun ketercapaian peran strategis yang ditetapkan

Temuan penelitian ini mengungkap bahwa walaupun komite sekolah memiliki potensi untuk terlibat lebih aktif dalam proses pengambilan keputusan, masih terdapat sejumlah kendala yang menghambat efektivitas peran mereka. Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kontribusi komite adalah melalui pemberian pelatihan yang lebih intensif terkait manajemen, pengawasan, serta kebijakan publik, khususnya yang berhubungan dengan sistem pendidikan dan tata kelola sekolah. Selain itu, perlu adanya perbaikan dalam pola komunikasi antara pihak sekolah dan komite. Penguatan modul peran dan penyusunan SOP yang berbasis praktik terbaik akan membantu komite menjalankan tugas dan fungsinya secara lebih terarah. Di samping itu, penting untuk mendorong proses pembentukan komite yang bersifat demokratis guna memperkuat posisi dan independensi mereka dalam struktur kelembagaan sekolah.

Analisa Penulis

Berdasarkan temuan tersebut, peran komite sekolah di SMP PGRI Kambu menunjukkan bahwa keberadaan komite belum sepenuhnya berfungsi sebagai mitra strategis sekolah dalam perumusan kebijakan. Keterlibatan komite masih lebih dominan pada aspek teknis-administratif, seperti penganggaran, kegiatan ekstrakurikuler, dan penerimaan siswa baru, sementara pada aspek yang lebih substantif, seperti pengembangan kurikulum, arah kebijakan jangka panjang, dan evaluasi mutu pendidikan, keterlibatannya masih terbatas. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara fungsi ideal komite sekolah dengan praktik di lapangan. Secara teoritis, komite sekolah seharusnya menjalankan fungsi sebagai pemberi pertimbangan, pendukung, pengontrol, dan mediator antara sekolah, orang tua, serta masyarakat. Apabila fungsi tersebut tidak berjalan secara optimal, maka proses pengambilan keputusan di sekolah cenderung tetap bersifat sentralistik dan kurang mencerminkan prinsip partisipatif.

Temuan ini juga dapat dikaitkan dengan teori tata kelola pendidikan partisipatif, yang menekankan pentingnya keterlibatan berbagai pemangku kepentingan dalam proses pengambilan keputusan. Dalam perspektif tata kelola partisipatif, sekolah tidak hanya dipandang sebagai lembaga birokratis yang dikendalikan oleh kepala sekolah dan guru, tetapi juga sebagai ruang sosial yang membutuhkan dukungan masyarakat. Komite sekolah berperan sebagai representasi masyarakat yang dapat memberikan masukan, pengawasan, serta dukungan terhadap kebijakan sekolah (Lidiawati & Fauzi, 2025). Namun, keterbatasan pemahaman anggota komite terhadap regulasi pendidikan dan manajemen sekolah menyebabkan partisipasi tersebut belum berjalan secara substantif. Dengan demikian, partisipasi komite masih berada pada tingkat konsultatif, belum sampai pada tahap kolaboratif, yaitu ketika komite benar-benar dilibatkan dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi kebijakan sekolah.

PENUTUP

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa komite sekolah memiliki posisi yang penting dalam mendukung pengambilan keputusan di sekolah, terutama terkait dengan proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, serta evaluasi kebijakan pendidikan. Meskipun demikian, pelaksanaannya di SMP PGRI Kambu masih belum maksimal dan cenderung terbatas pada tugas-tugas administratif. Beberapa faktor penghambat yang ditemukan meliputi rendahnya pemahaman anggota terhadap kebijakan pendidikan, kurangnya program pelatihan, lemahnya komunikasi antara pihak terkait, serta belum tersedianya sistem evaluasi dan struktur organisasi komite yang demokratis.

Agar peran komite sekolah dapat ditingkatkan, diperlukan langkah-langkah konkret seperti pemberian pelatihan yang terarah dan berkelanjutan, penyusunan prosedur kerja yang sistematis, peningkatan kualitas komunikasi antara sekolah dan komite, serta pembentukan struktur internal yang lebih partisipatif dan demokratis. Dengan cara tersebut, komite sekolah diharapkan mampu berfungsi secara efektif sebagai mitra strategis dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan yang transparan, bertanggung jawab, dan berorientasi pada peningkatan mutu pendidikan secara keseluruhan.

REFERENSI

- Bisri, A. M. (2020). *Studi Analisis Komite Sekolah/Madrasah dalam Mengawal Kualitas Pendidikan. Munaddhomah: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 1 (1), 51--64.
- Ghozali, M., & Ariskawanti, E. (1913). *Peran Supporting Agency Komite Sekolah dalam Pembiayaan Pendidikan. ISLAMIKA*, 4 (3), 504--515.
- Kasroni, I., Susanto, D., & Rasuna, R. (2025). Manajemen Komite Sekolah Dalam Penguatan Kualitas Layanan Pendidikan Di Min 1 Barito Timur Tahun 2024. *Jurnal Terapung: Ilmu-Ilmu Sosial*, 7(1), 186-194.
- Lidiawati, L., & Fauzi, M. A. N. (2025). Budaya kolaboratif kepala sekolah dalam membangun citra sekolah: Studi manajemen kepemimpinan pendidikan islam. *EL-BANAT: Jurnal Pemikiran Dan Pendidikan Islam*, 15(2), 554-573.
- Moleong, L. J. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya.
- Nisa, K., & Abidin, Z. (2024). Partisipasi Komite Sekolah di SDN Ajung 3 Jember Jawa Timur. *Adaara: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 14(1), 64-73.
- Permendikbud RI. (2016). Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2016 Tentang Komite Sekolah. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1-11.
- Purnawati, N., & Setyaningsih, R. (2024). Partisipasi Komite Sekolah Pada Pelaksanaan Program Sekolah di Sekolah Menengah Atas Negeri 15 Pekanbaru: Indonesia. *Ciencias: Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Pendidikan*, 7(1), 43-53.
- Reski, A., & Palittin, I. D. (2021). Pelatihan Penggunaan Edmodo untuk Meningkatkan Pengetahuan Teknologi Pembelajaran Guru SMP Yapis Merauke. *TAAWUN*, 1(02), 113-122.
- Sandra, T., Annur, S., & Afriantoni, A. (2023). Upaya Peningkatan Mutu Pendidikan Melalui Peran Komite. *Studia Manageria*, 5(2), 61-72.
- Sari, N., Kaharuddin, K., Bahri, A., & Abdul, N. B. (2023). Kontribusi Komite Sekolah dalam Pengembangan Pendidikan di SMA Negeri 3 Gowa. *Journal Socius Education (JSE)*, 1(3), 146-155. <https://doi.org/10.0505/jse.v>
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Sukinawan, K., Karwanto, K., Widodo, B. S., Khamidi, A., Haq, M. S., & Amalia, K. (2025). Peran Strategis Komite Sekolah dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan: Tinjauan Literatur. *JlIP-Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 8(4), 3974-3982.